



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GELAR KEKUATAN TNI TERPADU DALAM MENGAMANKAN IBUKOTA NUSANTARA DI WILAYAH KODAM VI/MULAWARMAN

Agung Widodo¹, R. Djoko Andreas Navalino², Wahyu Endriawan³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia ^{1 2}
agungwido2@gmail.com, djoko.navalino@idu.ac.id,

Korespondensi penulis: agungwido2@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the implementation of the integrated force deployment policy of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in securing the Nusantara Capital City, particularly in the Military Regional Command (Kodam) VI/Mulawarman area. Employing a qualitative approach and descriptive analysis, this study explores various strategies and measures undertaken by the TNI in maintaining security and order in the area designated as the center for the development of Nusantara Capital City. The findings indicate that the implementation of this policy includes coordination among various agencies and the three TNI services, and the utilization of information technology for surveillance and situation threats. This study provides recommendations for strategic improvements that the TNI can undertake to address future security challenges.*

Keywords: *Implementation, Integrated TNI Force Deployment Policy Implementation, Securing Nusantara Capital, Region of Kodam VI/Mulawarman*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan gelar kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terpadu dalam rangka mengamankan Ibu Kota Nusantara, khususnya di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai strategi dan langkah yang diambil oleh TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area yang menjadi pusat pengembangan Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam gelar kekuatan TNI Terpadu meliputi koordinasi antara berbagai instansi dan ketiga matra, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pengendalian ancaman di Ibukota Nusantara. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategis yang dapat diambil oleh TNI dalam menghadapi tantangan keamanan di masa depan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan gelar kekuatan TNI Terpadu, Mengamankan Ibukota Nusantara, Wilayah Kodam VI/Mulawarman

1. LATAR BELAKANG

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke lokasi yang lebih strategis di Kalimantan Timur. Mengingat pentingnya pembangunan IKN bagi masa depan bangsa, keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas utama. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan penting dalam menjaga keamanan demi kelancaran proses pemindahan dan pembangunan IKN. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan publik yang berdampak besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan



masyarakat, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi kebijakan ini juga berdampak terhadap ketahanan nasional Indonesia melalui sistem pertahanan negara, termasuk ketahanan wilayah IKN. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu sangat penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah IKN, terutama di wilayah Kodam VI/Mulawarman .

Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu untuk mengamankan Ibukota Nusantara yang melibatkan berbagai instansi dan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu tersebut merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan pembangunan kekuatan TNI diarahkan untuk meningkatkan dan menambah kemampuan dan kekuatan TNI menuju postur kekuatan pokok dengan konsep Tri Matra Terpadu secara bertahap dan berlanjut. Implementasi kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergi antara militer dan lembaga lain di tingkat daerah dan nasional, sehingga dapat merespons ancaman terhadap keamanan di IKN secara efektif. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah koordinasi antara berbagai instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pengendalian ancaman.

Gelar kekuatan TNI Terpadu di Ibukota Nusantara sampai dengan saat ini, dalam hal koordinasi antara berbagai instansi dan antar ketiga matra TNI maka setiap instansi yang terlibat dalam pengamanan IKN diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif dalam menjalankan tugas yang telah ditentukan. Ini termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga sipil lainnya. Namun dalam praktiknya, koordinasi masih mengalami kendala, seperti kurangnya komunikasi antara institusi yang mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Dari aspek gelar ketiga matra TNI Terpadu memerlukan adanya pemanfaatan yang optimal dari kekuatan masing-masing matra TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) untuk menciptakan sistem pertahanan yang menyeluruh, namun meski ketiga matra sudah dikerahkan, masih terdapat kesenjangan dalam sinergi operasional ketiga matra di lapangan yang perlu dioptimalkan; Terakhir, pada aspek pemanfaatan teknologi informasi, harus ada sistem informasi yang terintegrasi dalam bentuk System command and control untuk memantau dan mengendalikan ancaman secara real-time agar dapat dilakukan respons yang cepat dan tepat, namun penggunaan teknologi informasi masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga efisiensi dalam pengawasan dan pengendalian situasi kurang maksimal.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu berlangsung di wilayah Kodam VI/Mulawarman, serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban di Ibu Kota Nusantara mencakup koordinasi antara berbagai instansi dan ketiga matra TNI, gelar kekuatan ketiga matra di lapang serta pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi kunci dalam pengawasan dan pengendalian ancaman di IKN melalui pemanfaatan sistem command and control yang terintegrasi untuk mempermudah dalam pemantauan situasi dan pengambilan keputusan secara tepat waktu terhadap ancaman terhadap keamanan IKN.



2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Strategi Pertahanan Teritorial. Teori ini menekankan pada pentingnya mengamankan wilayah negara secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pertahanan serta penempatan pasukan militer di berbagai titik strategis wilayah untuk mengamankan perbatasan dan daerah vital negara . Teori ini berkaitan erat dengan penelitian, karena dalam mengamankan Ibukota Nusantara di wilayah Kodam VI/Mulawarman, diperlukan strategi pertahanan teritorial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan penempatan pasukan militer di titik-titik strategis. Hal ini untuk memastikan keamanan wilayah Ibukota Nusantara secara menyeluruh, termasuk perbatasan dan daerah vital di sekitarnya.

Teori Strategi Pertahanan Berlapis. Teori ini menekankan pada pentingnya membangun sistem pertahanan yang berlapis, mulai dari garis depan hingga wilayah pedalaman, untuk memperkuat keamanan wilayah negara . Penelitian ini juga dapat mengadopsi teori strategi pertahanan berlapis, di mana sistem pertahanan Ibukota Nusantara harus dibangun secara berlapis, mulai dari garis depan hingga wilayah pedalaman Kodam VI/Mulawarman. Dengan menerapkan pertahanan berlapis, keamanan Ibukota Nusantara akan lebih terjamin, karena adanya lapisan-lapisan pertahanan yang saling menguatkan.

Teori Implementasi Kebijakan. Teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi . Teori implementasi kebijakan sangat penting dalam penelitian ini, karena keberhasilan mengamankan Ibukota Nusantara bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu. Faktor-faktor seperti komunikasi antar instansi, ketersediaan sumber daya (personel, anggaran, dan sarana-prasarana yang sangat dibutuhkan dalam gelar kekuatan TNI terpadu di Ibukota Nusantara.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus (case study) , di mana fokusnya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu diimplementasikan dalam konteks Ibu Kota Nusantara di Kodam VI/Mulawarman. Penelitian ini akan dilakukan di Makodam VI/Mulawarman, Lanal Sangatta dan Lanud Dhomber, Mapolda Kaltim serta kantor instansi terkait di wilayah Kalimantan Timur selama 3 hari, dimulai dari 12-15 Juni 2024. Subyek dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan, diantaranya para pejabat Kodam VI/MLw, Lanal Sangatta, Lanud Dhomber, Polda Kalimantan Timur serta pejabat pemerintah daerah dengan obyek penelitian kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu dan proses serta hasil implementasinya dalam konteks keamanan di Ibu Kota Nusantara.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan Sugiono (2016), mencakup: Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait.



Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memperoleh pandangan yang mendalam ; Observasi dengan cara mengamati langsung pelaksanaan kebijakan gelar kekuatan selama periode penelitian berlangsung; serta Dokumentasi melalui pengumpulan dokumen-dokumen terkait kebijakan, laporan, dan data lain yang relevan. Pengolahan data dilakukan dengan cara transkripsi hasil wawancara dan mencatat hasil observasi serta dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menyiapkan data mentah agar siap untuk dianalisis. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari: Pengumpulan Data dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber selama penelitian berlangsung, Pengolahan Data dengan mengorganisir dan mempersiapkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, Kode dan Kategorisasi yakni mengkode data untuk mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul dari data yang telah dikumpulkan; Interpretasi Data yang diperoleh untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan; serta penarikan kesimpulan

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan dapat diperoleh data serta informasi yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dalam konteks keamanan di Ibu Kota Nusantara pada wilayah Kodam VI/Mulawarman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

Kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu untuk mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah strategis yang melibatkan semua matra TNI—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Polri serta berbagai instansi pemerintah dan lembaga sipil. Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan diperoleh beberapa temuan penting, yakni:

Koordinasi Antar Instansi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, masih terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi efektivitas pengamanan. Beberapa responden mengakui adanya kurangnya saluran komunikasi yang efektif, yang sering kali mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Meskipun telah diadakan rapat koordinasi secara berkala, hasilnya belum optimal dalam mengatasi masalah komunikasi yang ada di lapangan.

Sinergi Operasional Ketiga Matra TNI.

Dari aspek gelar ketiga matra TNI, observasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ketiga matra telah dikerahkan, masih terdapat kesenjangan dalam sinergi operasional, yakni masing-masing matra memiliki kekuatan dan keahlian yang berbeda, tetapi pemanfaatan yang optimal dari kekuatan tersebut belum sepenuhnya terwujud; dan beberapa



anggota Kodam VI/Mulawarman, Lanal Sangatta dan Lanud Dhomber melaporkan bahwa koordinasi antara matra sering kali tidak berjalan lancar, sehingga menghambat efektivitas respons terhadap ancaman yang kemungkinan di hadapi di wilayah IKN.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Aspek pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pengendalian ancaman juga menjadi fokus penelitian. Temuan terkait hal ini adalah **meskipun** ada rencana untuk menggunakan sistem *command and control* yang terintegrasi, saat ini pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas, serta **beberapa** responden menekankan pentingnya memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau situasi secara *real-time*, yang akan memungkinkan respons yang cepat dan tepat terhadap ancaman.

Dengan demikian secara umum dari penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu di Ibu Kota Nusantara menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Koordinasi antar instansi yang kurang efektif, sinergi operasional yang belum optimal antara ketiga matra TNI, dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi menjadi isu utama yang harus diperbaiki.

4.2 Pembahasan

Selanjutnya dilakukan pembahasan dan menganalisis temuan-temuan yang diperoleh terkait implementasi kebijakan gelar kekuatan TNI terpadu di Ibu Kota Nusantara mencakup aspek koordinasi antar instansi, sinergi operasional ketiga matra TNI dan pemanfaatan Teknologi Informasi.

Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antar instansi merupakan elemen krusial dalam menjaga keamanan wilayah negara, terutama dalam konteks pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan mempertimbangkan berbagai teori strategi pertahanan dan implementasi kebijakan, kita dapat memahami lebih dalam kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses koordinasi ini. Mengacu pada Teori Strategi Pertahanan Teritorial yang menekankan pentingnya mengamankan wilayah negara secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks IKN, penting untuk melihat koordinasi antar instansi sebagai upaya kolektif yang tidak hanya melibatkan TNI dan Polri tetapi juga masyarakat sipil dalam pelaksanaan pengamanan, yakni: (1) **Partisipasi Masyarakat**. Terkendala oleh kurangnya saluran komunikasi yang efektif, partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan menjadi terbatas. Sebagai contoh, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sering tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai langkah-langkah pengamanan yang diambil, sehingga keberadaan mereka tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung upaya pengamanan; (2) **Penempatan Pasukan di Titik Strategis**. Koordinasi yang buruk antara berbagai instansi membuat penempatan pasukan militer di titik-titik strategis menjadi tidak optimal. Jika informasi antara instansi tidak mengalir dengan baik, penempatan pasukan tidak dapat merefleksikan prioritas tinggi yang diperlukan untuk mengamankan daerah vital.

Kemudian dalam teori Strategi Pertahanan Berlapis, menggarisbawahi pentingnya membangun sistem pertahanan yang terintegrasi dari garis depan hingga wilayah pedalaman. Keterhubungan dan koordinasi antara berbagai unit di lapangan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pertahanan yang efektif, yakni: (1) **Lapisan Sistem Pertahanan**. Meskipun terdapat upaya rapat koordinasi, kurangnya hasil optimal menunjukkan adanya friksi dalam implementasi strategi berlapis ini. Tanpa komunikasi yang jelas dan efektif, masing-masing lapisan pertahanan tidak dapat saling melengkapi, menyebabkan celah dalam keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; (2) **Integrasi Antara Unit**. Koordinasi antar instansi harus menciptakan satu kesatuan dalam pengamanan. Jika masing-masing instansi berdiri sendiri tanpa komunikasi yang baik, strategi berlapis akan gagal. Hal ini sangat diperlukan, terutama saat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat selama situasi darurat;

Merujuk pada teori Implementasi Kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edward III yang menekankan empat dimensi penting dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka: (1) **Dimensi Komunikasi**. Hasil wawancara menunjukkan masih adanya kendala dalam saluran komunikasi yang efektif. Hal ini membuat pengambilan keputusan lambat, yang sangat berbahaya dalam konteks keamanan. Dalam menerapkan kebijakan keamanan, sistem komunikasi yang jelas antar instansi harus diprioritaskan; (2) **Sumber Daya**. Koordinasi antar instansi juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang mencukupi untuk masing-masing instansi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, setiap upaya pengamanan menjadi terbatas. Upaya koordinasi yang dilakukan harus mempertimbangkan alokasi sumber daya agar setiap instansi dapat berfungsi maksimal; (3) **Disposisi**. Sudut pandang tentang disposisi para pemangku kepentingan harus mencerminkan kepentingan bersama dalam pengamanan wilayah. Jika tidak ada keselarasan disposisi, maka misi koordinasi akan sulit dicapai; (4) **Struktur Birokrasi**. Struktur birokrasi yang kaku sering kali menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan cepat. Penting bagi instansi yang terlibat untuk memiliki struktur yang fleksibel dan responsif, agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang ada di lapangan.

Dalam penelitian Purnomo (2019) yang berjudul "Strategi Pertahanan Berlapis dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat," dijelaskan bahwa strategi pertahanan yang efektif harus melibatkan berbagai lapisan pertahanan yang saling terintegrasi. Di dalam konteks ini, penekanan pada struktur pertahanan yang komprehensif mencakup empat lapis: (1) lapis pertahanan militer, (2) lapis pertahanan keamanan, (3) lapis pertahanan nirmiliter, dan (4) lapis pertahanan diplomasi. Pembahasan berikut akan mengaitkan temuan dalam penelitian Purnomo dengan isu pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) dan kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi.

a. **Lapis Pertahanan Militer.**

Lapis pertahanan militer mencakup kekuatan angkatan bersenjata yang bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam konteks pengamanan IKN, militansi ini harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan kawasan. Purnomo menekankan pentingnya intelijen militer yang akurat dan responsif untuk mendeteksi potensi ancaman. Pengalaman dalam pengamanan perbatasan dapat diterapkan untuk

membangun dan memanfaatkan infrastruktur pertahanan di IKN, sehingga pasukan militer dapat diposisikan secara strategis berdasarkan risiko yang teridentifikasi.

b. Lapis Pertahanan Keamanan.

Lapis pertahanan keamanan ditujukan untuk menjaga ketenteraman publik dan mencegah tindakan kriminal. Purnomo mencatat bahwa kolaborasi antara kepolisian, badan keamanan lokal, dan masyarakat sipil sangat penting. Dalam pengamanan IKN, hal ini bisa diperkuat dengan membangun tim gabungan antara instansi yang berbeda. Kurangnya komunikasi antar instansi saat ini dapat menjadi hambatan, sehingga penguatan saluran informasi dan operasi yang kooperatif menjadi langkah yang *urgent* untuk mengantisipasi dan merespons potensi ancaman dengan lebih cepat dan efisien.

c. Lapis Pertahanan Nirmiliter.

Lapis pertahanan nirmiliter melibatkan upaya untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, serta memberdayakan masyarakat dalam pengamanan. Purnomo menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam mempertahankan keamanan sangat penting. Dalam konteks IKN, pelibatan masyarakat dalam berbagai program yang mendukung keamanan, seperti pengawasan lingkungan dan dialog komunitas, dapat menjadi langkah strategis. Hal ini akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap keamanan di daerah tersebut, sehingga meminimalisir risiko konflik.

d. Lapis Pertahanan Diplomasi.

Lapis pertahanan diplomasi berfokus pada hubungan bilateral dan multilateral untuk menjaga stabilitas. Purnomo menyoroti pentingnya komunikasi dan kerjasama antarnegara, khususnya di daerah perbatasan. Untuk IKN, pendekatan diplomasi yang baik dapat membantu dalam membangun kerjasama keamanan regional, termasuk dalam mengelola isu lintas batas yang mungkin timbul. Meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga dan memperkuat perjanjian keamanan akan menguntungkan tindakan pencegahan di tingkat internasional.

Berdasarkan analisis dari penelitian terdahulu oleh Purnomo tersebut, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam implementasi strategi pertahanan berlapis tersebut di IKN, yang sejalan dengan kesimpulan bahwa terdapat kekurangan dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yakni :

a. Kekurangan Komunikasi. Tanpa sistem komunikasi yang jelas dan terintegrasi, perbedaan dalam pemahaman tugas akan mengakibatkan ketidak-efektifan dalam menjalankan strategi pertahanan.

b. Keterbatasan Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan setiap instansi untuk melaksanakan peran pertahanannya dan melakukan koordinasi dengan baik.



-
- c. **Disposisi.** Agar setiap instansi dapat bekerja sama dengan baik, perlu ada keselarasan dalam disposisi dan tujuan antara pihak yang terlibat; hal ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap saling percaya.
- d. **Struktur Birokrasi.** Struktur birokrasi yang kaku sering kali menghadirkan hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat, yang sangat diperlukan di situasi darurat.

Dari pembahasan mengenai strategi pertahanan berlapis berdasarkan penelitian Purnomo (2019), jelas bahwa sintesis antara berbagai lapisan ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan IKN. Penguatan komunikasi, efisiensi sumber daya, keselarasan disposisi, dan perbaikan struktur birokrasi akan memperkuat kerjasama antar instansi. Melalui pendekatan yang terintegrasi, pengamanan di IKN dapat didapatkan dengan cara yang lebih solid dan responsif, menjaga kedaulatan dan kesinambungan keamanan wilayah negara secara menyeluruh.

Sinergi Operasional Ketiga Matra TNI.

Sinergi operasional ketiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI)—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan elemen kunci dalam pengamanan wilayah negara. Dalam konteks ini, teori strategi pertahanan teritorial dan berlapis dapat diterapkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya kerja sama antara matra dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, terutama di wilayah kritis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam teori Strategi Pertahanan Teritorial yang menekankan pentingnya mengamankan wilayah negara secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks sinergi operasional ketiga matra TNI, mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dan penempatan pasukan strategis. Dalam hal partisipasi masyarakat, maka masyarakat adalah garda terdepan dalam pengamanan wilayah. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pertahanan, seperti pengawasan lingkungan dan pembinaan keamanan wilayah, dapat meningkatkan keefektifan pertahanan teritorial. Program komunikasi dua arah antara TNI dan masyarakat harus diperkuat untuk membangun kesadaran dan respons terhadap ancaman. Kemudian untuk penempatan **Pasukan Strategis**, maka penempatan pasukan militer di titik-titik strategis, seperti daerah perbatasan dan lokasi vital, sangat penting untuk menciptakan *deterrence* terhadap kemungkinan ancaman. Dalam pelaksanaannya, harus ada koordinasi yang baik antar matra untuk mengoptimalkan penempatan dan menghindari tumpang tindih fungsi.

Berdasarkan teori Strategi Pertahanan Berlapis yang menekankan pentingnya pembangunan sistem pertahanan yang berlapis, mulai dari garis depan hingga wilayah pedalaman. Sinergi operasional ketiga matra harus mencerminkan pendekatan ini dengan: (1) **Koordinasi dan Dukungan Silang Antar Matra.** Masing-masing matra memiliki spesialisasi yang berbeda; Angkatan Darat menangani operasi darat, Angkatan Laut mengamankan lautan,

dan Angkatan Udara menggawangi kawasan udara. Sinergi efektif antara ketiga matra diperlukan untuk menciptakan sistem pertahanan yang terintegrasi dan responsif. Dengan pemetaan risiko dan potensi ancaman yang baik, angkatan yang satu dapat memberikan dukungan operasional kepada yang lainnya, mengurangi kesenjangan yang ada saat ini; (2) **Implementasi dalam Praktik.** Observasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ketiga matra telah dikerahkan, kerjasama yang optimal belum sepenuhnya terbangun. Esensial bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi rutin dan latihan bersama agar semua unsur dapat mengantisipasi tantangan yang ada.

Kemudian mengacu pada teori Implementasi kebijakan menurut Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka : (1) **Komunikasi.** Alasan utama mengapa koordinasi antar matra tidak selalu berjalan lancar adalah kekurangan dalam sistem komunikasi yang efektif. Harus ada saluran komunikasi yang jelas dan media komunikasi yang memadai antara ketiga matra agar informasi dan perintah dapat disampaikan dengan cepat dan akurat; (2) **Sumber Daya.** Optimalisasi penggunaan sumber daya harus dilakukan melalui efisiensi anggaran dan alokasi yang tepat. Dalam kondisi yang terbatas, kerjasama antara matra dalam penggunaan sumber daya (seperti alat dan logistik) dapat meningkatkan kesiapan operasional; (3) **Disposisi.** Pemahaman dan keselarasan disposisi yang berbeda antara matra menjadi tantangan tersendiri. Membentuk tim koordinasi yang dapat menjembatani perbedaan dibutuhkan agar semua pihak memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan wilayah; (4) **Struktur Birokrasi.** Struktur birokrasi yang kaku sering menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Perluasan fleksibilitas dalam struktur dan proses keputusan yang kolaboratif akan sangat mendukung sinergi operasional.

Dalam penelitian Santoso, D. (2022) yang berjudul "Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan Keamanan di Daerah Pembangunan Baru", penulis mengemukakan pentingnya peran TNI dalam menjaga keamanan di daerah-daerah yang sedang dalam pembangunan, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian ini menjelaskan tantangan yang dihadapi TNI dalam menjalankan fungsinya dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antar matra TNI dalam menjaga keamanan sebagai berikut:

a. **Tantangan yang Dihadapi TNI.**

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kompleksitas situasi keamanan di daerah pembangunan baru seperti IKN. Daerah tersebut seringkali menjadi fokus perhatian karena peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial, yang juga dapat memicu potensi konflik atau ancaman dari kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, adanya dinamika sosial yang cepat, seperti migrasi penduduk dan pergeseran struktur sosial, juga dapat memperburuk situasi keamanan jika tidak diantisipasi dengan baik. Koordinasi antara ketiga matra TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) juga dinyatakan sebagai tantangan. Setiap matra memiliki fungsi dan fokus yang berbeda dalam menjaga keamanan, sehingga diperlukan usaha ekstra untuk menciptakan sinergi yang efisien di antara mereka. Di sinilah peran komunikasi yang efektif menjadi sangat penting.

b. **Strategi yang Diterapkan.**

Santoso menawarkan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan respons TNI terhadap tantangan keamanan ini, yakni :

Peningkatan Komunikasi. Memperkuat jalur komunikasi antar matra serta dengan instansi terkait lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bersama, simulasi, dan pertukaran informasi secara berkala untuk memastikan koordinasi yang lebih baik pada saat menangani situasi keamanan.

Optimalisasi Sumber Daya. Memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Ini termasuk pemanfaatan teknologi terbaru untuk pemantauan dan pengawasan, serta pendistribusian personel yang lebih tepat berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan.

Penyesuaian Disposisi. TNI perlu fleksibel dalam penetapan strategi dan penempatan pasukan sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan. Penyesuaian ini harus berbasis pada analisis situasional yang akurat.

Reformasi Struktur Birokrasi. Membangun struktur birokrasi yang lebih responsif dan adaptif untuk menjawab tantangan yang ada, termasuk dengan cara mengurangi berbagai lapisan yang menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dalam rangka penanganan keamanan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan TNI dapat memberikan respons yang lebih tanggap terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul di wilayah-wilayah vital, seperti IKN, sehingga mampu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Penelitian Santoso menyoroti peran penting TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah pembangunan baru, terutama dalam konteks IKN. Melalui integrasi berbagai strategi yang melibatkan komunikasi yang lebih baik, pengoptimalan sumber daya, penyesuaian disposisi, dan reformasi birokrasi, TNI dapat meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan keamanan yang ada. Tahapan ini sangat penting untuk mengembangkan pertahanan yang komprehensif serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam konteks pertahanan negara, pemanfaatan teknologi informasi (TI) memiliki peranan penting dalam memperkuat keamanan wilayah. Teori Strategi Pertahanan Teritorial dan Strategi Pertahanan Berlapis, bersama dengan Teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana TI dapat diintegrasikan dalam strategi pertahanan yang komprehensif. Dalam diskusi ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana TI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian ancaman, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan di IKN. Mengacu pada teori Strategi Pertahanan



Teritorial yang menekankan pentingnya mengamankan wilayah negara secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks ini, TI dapat digunakan untuk: (1) **Pengawasan dan Deteksi Dini**. Teknologi informasi memungkinkan penggunaan sistem pemantauan seperti CCTV, *drone*, dan sensor untuk mendeteksi ancaman di perbatasan dan daerah vital. Sistem ini dapat memberikan data *real-time* yang penting untuk pengambilan keputusan; (2) **Partisipasi Masyarakat**. Masyarakat dapat dilibatkan melalui aplikasi *mobile* yang memungkinkan mereka melaporkan aktivitas mencurigakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran keamanan tetapi juga memperkuat jaringan pertahanan lokal; (3) **Integrasi Data**. Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap ancaman. Meskipun saat ini pemanfaatan TI masih terbatas, upaya untuk mengintegrasikan sistem *command and control* yang terhubung dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

Mengacu pada teori Strategi Pertahanan Berlapis yang menekankan pentingnya membangun sistem pertahanan yang berlapis, mulai dari garis depan hingga wilayah pedalaman. Dalam hal ini, TI berfungsi untuk: (1) **Koordinasi Antar Lapisan Pertahanan**. TI dapat digunakan untuk mengkoordinasikan komunikasi antara berbagai unit militer dan lembaga sipil. Sistem komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa informasi tentang ancaman dapat disampaikan dengan cepat dan akurat; (2) **Analisis Ancaman**. Dengan menggunakan teknologi analitik, data yang dikumpulkan dari berbagai lapisan pertahanan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola ancaman dan merencanakan respons yang lebih baik; (3) **Simulasi dan Pelatihan**. TI juga dapat digunakan untuk simulasi pelatihan bagi pasukan militer dan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi *virtual* dan *augmented reality*, pelatihan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Kemudian berdasarkan teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pemanfaatan TI dalam pertahanan, hal ini berarti: (1) **Komunikasi**. Pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam implementasi kebijakan pertahanan. Sistem TI yang baik harus mendukung saluran komunikasi antara pemerintah, militer, dan masyarakat; (2) **Sumber Daya**. Alokasi sumber daya untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem TI yang diperlukan untuk pertahanan. Investasi dalam infrastruktur TI harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons; (3) **Struktur Birokrasi**. Pembangunan struktur birokrasi yang mendukung penggunaan TI dalam pertahanan. Hal ini mencakup pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi TI dalam strategi pertahanan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Arifin, S. (2021) mengenai "Dinamika Kebijakan Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Nasional" yang menggarisbawahi pentingnya kebijakan pertahanan Indonesia yang berfokus pada penguatan struktur pertahanan dan keterlibatan TNI dalam misi keamanan domestik. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dalam menjaga keamanan nasional semakin kompleks. Dengan demikian, penguatan sistem pertahanan menjadi hal yang esensial. Arifin menekankan bahwa strategi pertahanan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang berlapis, yang mengintegrasikan berbagai unsur keamanan, mulai dari pertahanan militer hingga keamanan



publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari keamanan nasional dapat terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, teknologi informasi (TI) memainkan peran yang sangat penting.

Pemanfaatan TI dalam strategi pertahanan teritorial di negara ini dianggap sebagai alat yang krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap ancaman. Saat ini, masih terdapat keterbatasan dalam penggunaan TI, mulai dari infrastruktur yang kurang memadai hingga sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terampil dalam mengoperasikannya. Meskipun demikian, upaya untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi di mana masyarakat juga dilibatkan dapat memperkuat pertahanan nasional. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dapat memberikan dukungan informasi, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan. Ke depannya, investasi dalam teknologi informasi dan pengembangan sistem yang efisien di sektor pertahanan mutlak diperlukan. Ini termasuk pelatihan bagi personel, pembaruan alat dan sistem yang sudah ada, serta kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan TI yang inovatif. Dengan adanya sistem yang efisien dan terintegrasi, negara akan lebih siap untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul di IKN, baik itu dari luar maupun dalam negeri. Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian Arifin menggarisbawahi bahwa perwujudan keamanan nasional yang tangguh memerlukan strategi pertahanan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, serta memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan kedaulatan, tetapi juga menciptakan stabilitas dan perdamaian di dalam negeri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Koordinasi antar instansi adalah elemen vital dalam menjaga keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Analisis strategi pertahanan menunjukkan bahwa keberhasilan pengamanan IKN bergantung pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, TNI, dan Polri. Partisipasi masyarakat penting, tetapi saat ini terhambat oleh kurangnya saluran komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, perlu pengembangan sistem komunikasi yang transparan dan inklusif untuk melibatkan masyarakat. Selain itu, penempatan pasukan dan sistem pertahanan berlapis mengalami tantangan akibat koordinasi yang buruk, sehingga dibutuhkan pemahaman dan komunikasi efisien antar instansi. Dalam implementasi kebijakan, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan. Kesulitan komunikasi memperlambat pengambilan keputusan, sementara keterbatasan sumber daya menghalangi koordinasi. Keselarasan disposisi antar instansi sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengamanan. Fleksibilitas struktur birokrasi juga perlu ditingkatkan agar dapat merespons situasi darurat dengan cepat. Maka, reformasi dalam pendekatan koordinasi antar instansi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih kohesif di IKN. Investasi dalam sistem komunikasi, pengaturan sumber daya, dan penciptaan disposisi harmonis antar instansi akan menjadi langkah kunci untuk membangun keamanan nasional yang terintegrasi dan efektif di masa depan.



Kolaborasi efektif antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara TNI adalah kunci menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah, terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan pendekatan Strategi Pertahanan Teritorial dan Berlapis, partisipasi aktif masyarakat dan penempatan pasukan strategis sangat penting. Pertama, komunikasi yang kuat dengan masyarakat harus diperkuat melalui program partisipatif dan saluran yang jelas untuk meningkatkan efektivitas pertahanan teritorial. Kedua, penempatan pasukan di titik strategis harus dikoordinasikan dengan baik antar matra untuk memaksimalkan potensi setiap angkatan dan menghindari tumpang tindih. Ketiga, penerapan Strategi Pertahanan Berlapis membutuhkan koordinasi efektif antar matra dan evaluasi rutin untuk adaptasi terhadap tantangan keamanan yang berubah. Dalam implementasi kebijakan, tantangan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi harus diatasi. Saluran komunikasi efisien, penggunaan sumber daya optimal, keselarasan disposisi, dan struktur birokrasi yang fleksibel perlu diterapkan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas situasi keamanan di IKN memerlukan pendekatan proaktif dan terintegrasi untuk meningkatkan pengamanan. Dengan demikian, sinergi operasional yang kuat antara ketiga matra TNI dan dukungan masyarakat adalah landasan vital dalam menjaga keamanan di IKN. Implementasi strategi komprehensif dan kolaboratif sangat penting untuk mengantisipasi tantangan, sehingga kedaulatan dan integritas wilayah terjaga.

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk memperkuat keamanan wilayah di IKN menunjukkan pentingnya integrasi TI dalam strategi pertahanan, terutama melalui Teori Strategi Pertahanan Teritorial dan Berlapis, serta Teori Implementasi Kebijakan Edward III. TI berperan kunci dalam pengawasan dan deteksi dini ancaman menggunakan sistem pemantauan seperti CCTV dan drone, yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat. Partisipasi masyarakat dalam pertahanan, melalui aplikasi mobile untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, meningkatkan kesadaran kolektif dan jaringan pertahanan lokal. Integrasi data dari sumber informasi beragam memperkuat respons terhadap ancaman, mendukung komunikasi efektif antar unit militer dan lembaga sipil. TI juga membantu dalam analisis ancaman dan simulasi pelatihan, meningkatkan efektivitas bagi pasukan dan masyarakat. Kebijakan pertahanan perlu menekankan komunikasi jelas, alokasi sumber daya, dan struktur birokrasi yang mendukung pemanfaatan TI. Dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks, penguatan sistem pertahanan melalui TI sangat esensial. Investasi dalam TI dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk inovasi diperlukan agar Indonesia dapat menjaga stabilitas dan keamanan, terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN), dari ancaman domestik maupun eksternal. Keterlibatan masyarakat dan integrasi TI dalam strategi berlapis dapat meningkatkan ketahanan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2021), “Dinamika Kebijakan Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Nasional”, *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, Vol. 10, No. 2. Jakarta.
- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.



-
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2022 tentang Keamanan Ibu Kota Nusantara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Mabesad, (2023). *Dokumen Strategi Pengamanan IKN*. Jakarta: Mabesad.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Nasution, A. H. (1953). *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang Lalu dan yang Akan Datang*.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purnomo, (2019). "Strategi Pertahanan Berlapis dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat", Universitas Indonesia. Jakarta.
- Santoso, D. (2022). "Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan Keamanan di Daerah Pembangunan Baru", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 8, No. 1., Jakarta.
- Subroto, H. (2017). Strategi Pertahanan Berlapis dalam Menjaga Kedaulatan NKRI. *Jurnal Pertahanan*, 3(2), 199-212.
- Soekarno. (n.d.). *Catatan Pemikiran dan Perjuangan Bangsa*
- Sugiono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic Human Resources Management in the Global Era: Navigating Opportunities and Challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).
- Susilo, B. (2022). *Kebijakan Pertahanan Nasional dan Implementasinya di Era Modern*. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan.
- Tanjung, M. (2021). Pengembangan Kapasitas Personel TNI dalam Menghadapi Ancaman Modern. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 15(2), 234-245